

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjalankan demokrasi, hal ini ditandai dengan adanya partai politik dan pemilu sebagai pencipta iklim politik yang demokratis. Partai politik juga merupakan instrument penting didalam upaya mewujudkan demokrasi. Partai politik juga memiliki peran yang signifikan bagi terciptanya iklim politik yang demokrasi dan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat (Khanata, 2004:148).

Kegiatan demokrasi memiliki dua point terpenting didalamnya, dimana terdapat kompetisi dan partisipasi, menurut Hendra Nugroho Saputro S. AP. ([Fokkasi \(lan.go.id\)](http://fokkasi.lan.go.id) . di akses pada tanggal 18 maret 2022) Demokrasi pada hakikatnya adalah menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi di pemerintahan. Hingga saat ini, demokrasi masih dianggap sebagai sebuah sistem politik yang terbaik di beberapa negara. Sebagai bentuk dari sistem politik, demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang sedang bersaing memperebutkan jabatan publik di suatu pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) unsur penting dalam penerapan pemilihan umum, yaitu adanya unsur partisipasi masyarakat dan kontestasi dari para calon peserta pemilihan. Di negara Indonesia Pesta Demokrasi diselenggarakan dalam kurun waktu lima tahun sekali dan para calon bebas bersaing untuk merebut suara, sebuah pesta demokrasi yang sangat dinantikan sebagai tolak ukur keberhasilan apa yang disebut demokrasi itu sendiri. Berdasarkan paham demokrasi, partai politik suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan. Setiap partai politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar saat pemilihan umum agar didominasi oleh partai politik yang bersangkutan.

Partai politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Kehadiran partai politik tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan perannya untuk mengelola negara. Keberadaan partai politik menjadi keharusan, sebab fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan pemilihan umum (pemilu), menampung berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, menyediakan pemilhan lain kebijakan, dan mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan. Istilah partisipasi politik menurut Arifin Rahman (2012: 129) adalah diterapkannya kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik.

Adanya pemilihan umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai (Henry B. Mayo. 1986:61). Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 2012, Pemilihan Umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana dapat diketahui bersama, bahwa momentum pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 ini merupakan momentum pesta rakyat dalam menentukan pilihan baik di Legislatif maupun Eksekutif. Upaya yang dilakukan partai politik sangat beragam dalam hal meraih suara dalam pemilihan umum baik di tingkat Kabupaten/Kota, hingga DPR RI dalam hal ini Legislatif, maupun Eksekutif yang akan menduduki kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden). Syarat pemilih yang di jelaskan oleh Asshidiqie (2013) adalah 1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya 3. Terdaftar sebagai pemilih. 4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian). 5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya. 6. Terdaftar di DPT.

Di Indonesia sendiri pada pemilihan umum 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 16 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Adapun

partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai PKP. Di ajang pesta Demokrasi pemilu 2019 ini lebih menarik dibanding pada saat pemilu 2014, hal ini dikarenakan adanya partai politik pendatang baru yang memeriahkan ajang pesta demokrasi lima tahun sekali. Adapun partai politik baru yang ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi yaitu Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir dengan ideologi serta citra partainya masing-masing yang kian membuat semarak pesta demokrasi di Indonesia kian menarik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam BAB II dalam PKPU Nomor Tahun 2018 dalam Persyaratan dan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yakni berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% jumlah kabupaten/kota di Provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan pemilu. Dari beberapa partai politik baru yang ikut serta dalam pemilu serentak 2019 adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Merujuk pada ketentuan PKPU Nomor Tahun 2018 dalam Persyaratan dan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Partai Solidaritas Indonesia telah melebihi target ketercapaian jumlah anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik partai

politik sesuai tingkat kepengurusan dengan presentase 70% jumlah anggotanya ialah kaum muda yang masih berusia 18-40 tahun.

Dari beberapa partai politik baru yang ikut serta dalam pemilu serentak 2019 adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 mengenai persyaratan dalam pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, PSI sebagai partai Politik baru sudah memenuhi syarat. Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI, didirikan di Jakarta pada tanggal 16 November 2014. Sebuah partai politik baru dalam kontestasi pesta demokrasi tahun 2019, sebagai partai politik baru bukan berarti PSI tidak memiliki tempat khususnya di wilayah Yogyakarta dan PSI bisa saja bersaing dengan jumlah anggota sebanyak 5.076 orang anggota.

Adapun berikut data Calon Legislatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 1. Calon Legislatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama	Daerah Pemilihan
Martanti Endah Lestari Nur Sigit Nugraho, S.E Andreas Andi Bayu Hermawan Risa Karmida, S.Sos Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M Sanddy Bhudi Agung Nugroho, S.E	Daerah Istimewa Yogyakarta 1
Maryati Guntur Saroso	Daerah Istimewa Yogyakarta 2
-	Daerah Istimewa Yogyakarta 3
-	Daerah Istimewa Yogyakarta 4
Suryatiningsih Budi Lestari, S.H Ir. Welly Chan, M.Div R. Kuncoro Wahyu Nugroho, S.E	Daerah Istimewa Yogyakarta 5
Sylvi Dewajani S.Psi., Psi., M.Sc Irving Rua Berlin Dani Eko Wiyono, S.T., M.T	Daerah Istimewa Yogyakarta 6
Erlin Susanti A.Ma., Pd.sd Antonius Pinta Jalu Sunaryo	Daerah Istimewa Yogyakarta 7

Sumber: <https://diy.kpu.go.id>

Sebagai partai yang terbilang masih baru ini, pada Pemilu 2019 Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia berhasil mendapatkan suara sebanyak 47.469 suara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 16 caleg ikut pemilu 2019 berasal dari Dapil 1 (Kota Yogyakarta) yaitu 6 orang, Dapil 2 (Kabupaten Bantul) yaitu 2 orang, Dapil 5 (Kabupaten Sleman) yaitu 3 orang, Dapil 6 (Kabupaten Sleman) yaitu 3 orang, dan Dapil 7 (Kabupaten Gunungkidul) yaitu 2 orang. Dan diantara 16 orang caleg yang didaftarkan, terdapat 1 orang caleg yang lolos untuk duduk di kursi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M dengan perolehan suara sebesar 2.458 untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta I (<https://www.kpu.go.id>).

Tidak kalah penting nya untuk dibahas dalam pemilu 2019 ini mengenai Partai Politik baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebuah partai politik yang menaungi anak muda. Hal yang tidak kalah menarik dari partai politik baru ini yaitu bagaimana partai politik melakukan komunikasi dalam menjual dan memperoleh suara partai atau marketing politik. PSI yang merupakan bagian dari partai politik yang baru saja mengikuti panggung politik di Indonesia, dimana partai ini di dominasi oleh generasi muda sebagai anggotanya, yang dimana hal ini menyebabkan idealisme partai ini masih sangat kuat.

Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai politik baru di Indonesia yang berdiri pada 16 November 2014. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yakni Grace Natalie seorang mantan pembawa acara berita dan jurnalis. Partai Solidaritas Indonesia resmi menjadi peserta Pemilu tahun 2019 setelah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan merupakan satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pemilihan Presiden tahun 2014. Partai Solidaritas Indonesia memiliki ciri khas partai anak muda, 70 persen masih dibawah 40 tahun. Beberapa tokoh kaum muda yang bergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia adalah Tsamara Amany Alatas, Ratu Isyana Bagoes Oka, Raja Juli Antoni, serta Giring Ganesha yang merupakan vokalis grup band Nidji, dan masih banyak tokoh kaum muda lainnya. (www.nasional.kompas.com/2018/02/22/12132451/psi-grace-natalie-dan-citra-partai-anak-muda) diakses 28 Maret 2022)

Jika dilihat dari beberapa tokoh kaum muda yang bergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia mampu mempengaruhi dan meyakini kepada kaum muda lainnya untuk berpartisipasi dan bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas

Indonesia. Strategi komunikasi yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia memiliki tujuan yang lebih spesifik untuk berpartisipasi membentuk suatu nilai dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik secara khusus merupakan proses komunikasi yakni seperti media sosial, media elektronik, dan media cetak. Melalui strategi komunikasi tersebut, Partai Solidaritas Indonesia mampu menandingi partai lama seperti PBB dan PKPI. Partai Solidaritas Indonesia lebih dulu dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh KPU. Dengan banyaknya jumlah anggota yang bergabung pada Partai Solidaritas Indonesia ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan memenuhi syarat jumlah anggota sesuai dengan tingkat kepengurusan dalam verifikasi faktual yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

Pada pemilu selanjutnya yang akan diadakan pada 2024, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) partai yang menaungi anak muda harus lebih memfokuskan kembali agar pemuda pemudi dapat memilih PSI sebagai partai pilihannya, sebab di lansir dari www.cnnindonesia.com (Survei Pemilu: Milenial Golput Diprediksi di Atas 40 Persen (cnnindonesia.com) di akses 17 maret 2022) "Setelah diakumulasi, jumlah pemilih milenial yang merasa tidak perlu datang ke TPS [tendensi golput] berada di atas 40 persen. Alasan terbanyak mengapa mereka merasa tidak perlu datang ke TPS sebesar 65,4 persen dan 25,3 persen karena tidak tahu jadwal pilpres. Sisanya adalah berbagai alasan yang tidak begitu signifikan," kata CEO Jeune & Raccord Communication Monica. Remaja merupakan diskursus yang menarik dalam dunia politik terutama dalam pesta demokrasi karena menurut Wage Wardana selaku ketua KPU kota Jakarta Timur (Kelaspemilu.org) remaja dianggap sebagai segmen unik dan memiliki pengaruh dalam arah demokrasi di berbagai Negara. Peran PSI untuk dapat menerapkan strateginya kepada remaja yang merupakan pemilih pemula tentu akan memberikan banyak keuntungan, dimana menurut Arifin Rahman (2012: 128) Pemilih pemula sangat memiliki andil yang besar dalam pemilu. Mereka sangat berperan sebagai pengawas partisipatif pada pemilu yang akan diselenggarakan. Partisipatif/ partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

PSI ingin mendorong dan mendidik anak muda bahwa politik bukan hanya untuk orang tua; sebaliknya, itu juga untuk kita. Saat ini banyak sekali anak muda—bisa dibilang mereka pemilih pemula—yang tidak ikut pemilu—baik itu pilkada, pemilu legislatif, partai rakyat, atau partai demokrasi—dan cenderung abstain. Juga remaja. Minimnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu yang berlangsung pada tahun-tahun sebelum hadirnya Partai Solidaritas Indonesia, yaitu pemilihan gubernur 2007, pemilihan legislatif dan presiden, pemilihan gubernur 2013, dan pemilihan legislatif 2014, adalah tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang ditunjukkan oleh data Komisi Pemilihan Umum Daerah Parepare.

Dari total 299.880 orang, terdapat 15.633 pemilih pemula yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Mereka adalah pemilih berusia antara 17 hingga 19 tahun atau yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali pada

Pemilu 2019. Wawan Budiyanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogya, berharap dengan hadirnya TPS baru akan meningkatkan partisipasi pemilih. Hal ini karena ajakan teman sejawat untuk mencoblos jauh lebih efektif dibanding yang lain.

Pentingnya strategi komunikasi dalam politik, akan mendorong elektabilitas dari pada suatu partai, dimana hal ini akan menjadi sesuatu yang baik jika di kelola dengan baik pula, menurut Mc Nair yang dikutip oleh Hafied Cangara (2009:36) komunikasi politik adalah murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda. Dengan begitu, penting bagi Partai Dolidaritas Indonesia (PSI) untuk mengkaji, menentukan, dan menerapkan strategi komunikasi politik yang sesuai dengan targetnya yaitu remaja.

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar, yang mana terdapat kurang lebih 60 kampus tersebar di area Yogyakarta. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta adalah kota dengan universitas terbanyak di Indonesia. Banyaknya pemuda pemudi di Kota Yogyakarta yang menuntut ilmu membuat jumlah pemuda pemudi di Kota Yogyakarta bertambah. Dengan begitu, dengan adanya strategi komunikasi yang tepat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat meraih audience dan suara yang lebih banyak pada saat Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pemilih pemula dalam menghadapi Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunikasi Politik yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia kedepannya pada pemilu tahun 2024 di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi komunikasi politik yang akan dilakukan PSI pada pemilu 2024 di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau dijadikan sebagai referensi studi Ilmu Pemerintahan khususnya penelitian Komunikasi Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Partai PSI sebagai acuan agar dapat melihat seberapa efektif strategi komunikasi yang selama ini telah dilakukan oleh partai untuk mempengaruhi minat pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024
- b. Bagi masyarakat agar lebih mengetahui seberapa jauh langkah nyata Partai PSI terutama dalam menjalankan komunikasi politik di masyarakat luas

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini peneliti ingin menyampaikan terkait penelitian terdahulu yang dijadikan acuan pada penelitian ini, ada sedikit perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian lainnya, dimana penelitian ini menitik berat kan subjek penelitian adalah anak

muda, dimana anak muda merupakan salah satu hal yang menarik dalam perpolitikan dimanapun dan bagaimana pun atmospheranya.

Tabel 2. Kajian Pustaka

No	Judul	Penulisan dan Tahun	Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilu 2014	Harold Y. Pattisina (2015)	Hasil dari penelitian ini, strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PDI Perjuangan yaitu menyampaikan segala bentuk program kerja kepada masyarakat, memberikan informasi kepada media massa serta turun langsung menemui masyarakat.	Partai yang digunakan dalam penelitian terdahulu merupakan PDI Perjuangan. Selain itu, periode pemilu yang diteliti oleh penelitian terdahulu merupakan Pemilu tahun 2014.
2.	Strategi Komunikasi Politik Pasangan Bambang-Icek dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011	Rosa Arista Narendra (2013)	Hasil dari penelitian ini, strategi politik yang digunakan oleh pasangan Bambang-Icek yaitu merawat ketokohan yaitu dengan cara menjalankan pemerintahan secara <i>public9ve</i> , pemantapan kelembagaan dengan mengadakan pertemuan rutin, memahami khalayak dengan cara ikut turun langsung, serta memilah dan memilih media.	Subjek penelitian dari penelitian terdahulu merupakan pasangan Bambang-Icek yang hanya tim kecil dengan tujuan lebih besar. Periode pemilihan yang digunakan merupakan Pemilu pada tahun 2011.
3.	Strategi Marketing Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2019 (Studi	Mutiara Rahmah, Maimun (2018)	Hasil penelitian ini strategi marketing partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPW Aceh melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui baliho dan spanduk program-program kerja dan aksi nyata yang	Strategi yang diteliti merupakan strategi marketing, bukan strategi komunikasi politik. Partai yang diteliti juga merupakan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk menghadapi

No	Judul	Penulisan dan Tahun	Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Kasus di Provinsi Aceh)		inovatif dan solutif dibidang ekonomi serta melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat baik melalui program kerja yang menawarkan program kerja yang berbasis pembangunan ekonomi melalui kegiatan bantuan usaha dan UMKM serta mempertimbangkan kearifan 10ubli.	pemilu ada tahun 2019.
4.	Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparasi Partai Politik	Atie Rachmatie, O. hasbiansyah, Emah, Khotimah, Dadi Ahmadi (2013)	Dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci budaya politik, strategi komunikasi politik dan keterbukaan informasi Public dilingkungan partai politik	Penelitian ini menjelaskan tentang strategi komunikasi politik secara rinci dan akan digunakan sebagai salah satu sumber pustaka.
5.	Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum	Eko Harry Susanto (2013)	Dalam penelitian ini masyarakat mengharapkan komunikator memiliki kemampuan berkomunikasi didapan public, memahami media komunikasi yang dimanfaatkan ketika berbicara dengan masyarakat, mengetahui masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi public demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan	Dalam penelitian ini, penjelasan tentang dinamika komunikasi politik dalam pemilu yang mana informasi ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber pustaka.
6.	Strategi Pemenangan	Surahmadi (2016)	Dalam penelitian ini strategi komunikasi	Dalam penelitian terdahulu ini,

No	Judul	Penulisan dan Tahun	Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Politik Pasangan Idza-Narjo dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2017		politik yang digunakan oleh pasangan Idza-Narjo dalam pemenangan pemilukada Kabupaten Brebes 2012 yaitu merawat krtokohan dan memantapkan kelembagaan dan membangun consensus.	strategi yang digunakan adalah strategi pemenangan politik yang digunakan untuk memenangkan pasangan Idza-Narjo. Periode pemilu yang diteliti juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni periode 2012 dan periode 2024.
7.	Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014	Debora Sanur Lindawati (2013)	Dalam penelitian ini partai diharap bisa mengoragnisir kegiatan kampanye dan juga menyusun pedoman etika	Strategi yang diteliti merupakan strategi partai politik, yang mana berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni akan menggunakan strategi komunikasi politik. Periode pemilu yang akan digunakan juga adalah Pemilu tahun 2014.
8.	Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai	Khoiruddin Muchtar (2016)	Dalam penelitian ini menjelaskan gambaran Partai Golkar mendongkrak citra partai untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.	Penelitian ini menjelaskan tentang komunikasi politik yang digunakan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akna menjelaskan tentang strategi-

No	Judul	Penulisan dan Tahun	Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
				strategi yang akan digunakan pada saat pemilu. Objek yang akan diangkat juga sedikit berbeda, dimana pada penelitian ini objeknya adalah citra partai sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan mengacu pada remaja.
9.	Strategi Komunikasi Politik Partai pada Pemilu Legislatif 2009 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta)	Akhirul Aminulloh (2010)	Dalam penelitian ini strategi yang digunakan antara lain terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar aspirasi masyarakat, berkoalisi dengan partai lain, serta mengembangkan dan memberdayakan organisasi politik secara keseluruhan	Penelitian ini meneliti tentang strategi komunikasi partai yang berbeda yaitu pada Partai Keadilan Sejahtera. Penelitian ini meneliti tentang strategi yang sudah dilakukan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan meneliti tentang strategi yang baru akan digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia.

No	Judul	Penulisan dan Tahun	Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
10.	Analisis Strategi Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemenangan Rudi dan Purnomo dalam Pilkada 2015 Kota Surakarta	Anna Valiana (2016)	Dalam penelitian ini strategi komunikasi yang digunakan dengan komunikasi secara langsung dengan memahami lingkungan dan target, komunikasi dua arah, serta mempersiapkan infrastruktur komunikasi untuk memperluas basis dukungan.	Objek penelitian ini adalah pasangan Rudi-Purnomo. Periode Pemilu yang digunakan juga berbeda, yakni Pilkada 2015 dengan Pemilu 2024.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah sebuah proses komunikasi atau penyampaian informasi yang dimana informasi atau pesan yang disampaikan berkaitan dengan politik. Komunikasi politik dilakukan oleh politikus atau seseorang yang berkecimpung dalam dunia politik atas dasar untuk mencapai sebuah tujuantujuan politik yang diinginkan. Komunikasi Politik ditempatkan sebagai kajian ilmu politik, karena pesan pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkait kekuasaan politik Negara, pemerintahan dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan Politik (Harun, 2006).

Dalam Mukarom (2016) komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Dengan demikian, kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide ata pesan yang disampaikan.

Thomas M. Scheihwadel dalam (Mulyana, 2001) mengemukakan bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk menyatakan dan mendukung identitas diri,

membangun kontak social dengan orang sekitar dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang diinginkan.

Adapun unsur-unsur komunikasi politik menurut Harun (2006) sebagai berikut:

a. Komunikator

Komunikator yaitu individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, Lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh masyarakat.

b. Komunikan

Dalam sebuah komunikasi politik, komunikan dapat bersifat perseorangan, kelompok, dapat berupa institusi, oraganisasi, masyarakat, partai politik dan dapat pula Negara atau pemerintah Negara lain.

c. Pesan Politik

Pesan politik merupakan pesan yang disampaikan atau dikomunikasikan dari sumber (komunikator) atau isi informasi yang merupakan. Seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau tujuan.

d. Media

Media merupakan alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak atau elektronik)

e. Feedback

Feedback merupakan tanggapan yang terjadi setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

Maka berdasarkan penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan konsep dari komunikasi politik adalah suatu bentuk komunikasi dari partai politik ke partai politik lainnya atau kepada jhalayak terkait tujuan dari pada partai politik itu sendiri, dimana praktek komunikasi politik ini diharapkan dapat memberikan feedback yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh partai politik tersebut.

2. Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi merupakan perpaduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam

arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda-beda tergantung pada suatu kondisi dan situasi (Effendi, 2017)

Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Ardial, 2010). Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, langkah yang tepat bagi seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan antara lain dengan merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta memantapkan kelembagaan politiknya.

Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang sangat berperan dalam pemenangan pemilihan umum langsung. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan, hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 1990).

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat di Tarik kesimpulan terkait strategi komunikasi politik merupakan suatu teknik yang dipraktekan untak dapat mencapai suatu tujuan daripada partai politik, dimana praktek strategi komunikasi politik ini berfungsi untuk dapat mencakup banyak hal dan situasi yang cenderung fluktuatif, realita social tidak begitu monoton pada putaran pemilu, banyak aspirasi yang harus di dengar serta banyak tujuan yang harus di tempuh oleh suatu partai politik. Adapun indicator dari pada strategi komunikasi politik menurut Dr. Syahrial Syarbaini, MA (2021) adalah: Kredibilitas, Daya Tarik, Kesamaan Sumber, Power (kekuatan), dan Pesan Politik. Berikut ini penjabaran setiap indikator strategi komunikasi politik menurut Syahrial Syarbaini:

a. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dalam komunikasi politik merujuk kepada tingkat kepercayaan dan keahlian komunikator dalam menyampaikan pesan. Kredibilitas disini akan sangat berpengaruh kepada efektivitas pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik sebab audiens hanya akan menerima pesan jika komunikator politiknya dapat dipercaya dan ahli di bidangnya. Jika komunikator memiliki kredibilitas yang tinggi, maka pesan yang disampaikan akan mudah diterima dan dipercaya oleh

komunikasikan (Syahrial Syarbaini, 2021). Sebaliknya, jika tingkat kredibilitas komunikator politik rendah, maka pesan tidak tersampaikan secara efektif.

Indikator kredibilitas komunikator dalam strategi komunikasi politik itu terdiri atas dua sub-indikator yaitu tingkat kepercayaan (*source trustworthiness*) dan keahlian (*source expertise*) komunikator politik. Tingkat kepercayaan dalam kredibilitas komunikator politik ini berarti bagaimana komunikator politik mampu memberikan informasi secara jujur dan tidak bias kepada satu pihak tertentu. Sedangkan, keahlian komunikator politik yang dimaksud disini adalah tingkat pengetahuan komunikator politik atas pesan yang disampaikan (Winda Kustiawan *et. al.*, 2022:17).

b. Daya Tarik (Attractiveness)

Daya tarik dalam strategi komunikasi politik merupakan indikator yang merujuk kepada kemampuan menarik atensi audiens atau komunikasikan melalui penampilan fisiknya, pola pikir, gaya berpakaian, wibawanya, atau kemampuan pidatonya. Daya tarik ini biasanya lebih mudah diidentifikasi oleh audiens secara langsung karena terlihat oleh mata (Syahrial Syarbaini, 2021). Seorang komunikator politik dituntut untuk memiliki daya tarik yang unik agar audiens bisa langsung menyukai dan menaruh perhatian pada komunikator tersebut. Daya tarik juga bisa menjadi citra komunikator politik di mata audiensnya.

Menurut Petty (1996) dalam Driandipta Buana M.F. (2015:22), daya tarik seorang komunikator politik dapat menambah keunggulan bagi dirinya. Jika terdapat dua komunikator politik yang memiliki kredibilitas yang sama, namun salah satu di antara mereka memiliki daya tarik yang lebih tinggi, maka komunikator satu inilah yang bisa unggul dalam mengambil perhatian dan kepercayaan audiensnya. Secara tidak otomatis juga pesan yang disampaikan akan lebih efektif dibandingkan komunikator politik yang tidak memiliki daya tarik tinggi tadi (Driandipta Buana M.F., 2015:22).

c. Kesamaan

Indikator ketiga dari strategi komunikasi politik adalah kesamaan sumber. Kesamaan sumber merujuk kepada kesesuaian antar harapan, kebutuhan, keinginan, dan perasaan audiens dengan komunikator politik. Audiens akan lebih menyukai komunikator politik yang membawa pesan dan visi yang sama dengan

kebutuhan mereka. Kesamaan antara komunikator politik dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan audiens membuat komunikator dilihat sebagai orang yang membawa suasana positif dan menyenangkan (Ni Komang Mirah A.R. *et. al.*, 2021:3). Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena ada ikatan emosional dan empati yang terjalin untuk komunikator politik tersebut sehingga audiens merasa senang dan menyukai komunikator tersebut.

d. Kekuatan (*Power*)

Kekuatan (*power*) dalam strategi komunikasi politik tidak merujuk kepada kekuatan fisik dan mental, melainkan diukur dari seberapa bisa dan kuat komunikator ini mempengaruhi audiens dengan pesan-pesannya. Komunikator politik yang memiliki kekuatan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik karena mereka mampu mempengaruhi pendapat dan sikap audiensnya. Semakin komunikator publik ini memiliki kekuatan, maka semakin efektif pesan yang disampaikan kepada target audiens (Winda Kustiawan *et. al.*, 2022:18).

Tidak hanya mampu menyampaikan pesan dengan sangat baik, komunikator politik yang memiliki kekuatan juga memiliki kemampuan penerimaan pesan yang baik. Penerimaan pesan yang baik membuat mereka mudah mencerna informasi dan umpan balik yang datang dari audiensnya. Dengan itu, mereka dapat mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan pesan umpan balik tersebut. Komunikator politik yang memiliki kekuatan akan memiliki banyak peminat dan penggemar karena audiens akan cenderung memilih komunikator yang bisa menjanjikan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian sekecil-kecilnya (Driandipta Buana M.F., 2015:22)

3. Pemilih Pemula

Dalam konteks pemilihan umum, pemilih merupakan warga negara yang sudah memenuhi syarat secara usia yaitu 17 tahun atau lebih, memiliki jiwa dan ingatan yang sehat, dan bukan seorang anggota TNI/POLRI. Pemilih dalam suatu pemilihan umum mendaftar kepada panitia penyelenggara pemilihan umum agar bisa berpartisipasi. Sedangkan, konsep pemilih pemula itu diartikan sebagai pemilih yang baru pertama kali memilih karena baru memasuki usia minimal seorang pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Perbedaan utama antara pemilih pemula dengan pemilih

kelompok lain adalah tingkat antusiasme dan preferensi mereka terhadap calon yang akan dipilih (Pahmi Sy, 2010:54).

Perilaku pemilih pemula ini dinilai unik karena mereka memiliki antusiasme yang tinggi. Pemilih pemula yang memang baru memiliki hak pilih tadi akan sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam pemilu meskipun pengetahuannya atas pemilu dan calonnya masih sangat minim. Pemilih pemula juga cenderung mengeluhkan perubahan namun diri mereka sendiri belum memiliki keputusan yang bulat dalam memilih calon atau partainya. Pemilih pemula juga cenderung terpengaruh oleh lingkungan politik lokalnya daripada ideologi diri sendiri. Pengaruh dari orang terdekat seperti keluarga, kerabat, atau guru di sekolah seringkali menjadi penentu keputusan pemilih pemula ini. Oleh sebab itulah, pemilih pemula ini biasa disebut dengan istilah *swing voters* (Azirah, 2019:90).

Pemilih pemula menjadi partisipan politik yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon pemimpin daerah atau negara, baik itu memilih anggota DPRD, DPR, atau Presiden. Berdasarkan pemilihan umum serentak nasional pada tahun 2019 lalu, suara dari pemilih pemula diperebutkan oleh calon yang akan dipilih. Suara pemilih pemula yang sebesar 20-30% dari total ini selalu menjadi incaran calon yang dipilih karena bisa mendongkrak perolehan suara mereka secara keseluruhan. Tidak jarang juga suara dari pemilih pemula ini yang menentukan kemenangan bagi calon pemimpin atau partai yang berkompetisi (Indra Richard, 2019:10). Bagi calon yang berhasil mengambil suara pemilih pemula, maka sudah bisa dipastikan calon tersebut bisa menciptakan citra positif dihadapan publik.

Pemilih pemula disebutkan masih membutuhkan pembinaan dan pengarahan yang lebih intens agar mereka bisa berperan dalam politik dengan bijaksana. Pasaunya, pemilih pemula biasanya masih belum memiliki pemikiran kritis terhadap demokrasi dan pemimpin daerah yang mencalonkan. Pemilih pemula cenderung memilih berdasarkan pengaruh yang didapatkan dari lingkungannya atau sekedar mengikuti suara mayoritas yang dipilih oleh orang terdekatnya. Oleh karena itulah pemilih pemula masih membutuhkan pembinaan dan pengarahan agar bisa memilih secara tepat dan bijaksana (Basuki R. & Esther, 2016:28).

Pemilihan yang bijaksana dan tepat oleh pemilih pemula sangat berarti bagi pesta demokrasi itu sendiri. Karena partisipasi politik pemilih pemula mengambil 20% total suara keseluruhan, maka harus dipastikan kalau penggunaan hak pilih mereka berarti karena kesalahn-kesalahan yang tidak diharapkan. Contohnya seperti

hak pilih pemilih pemula tidak digunakan karena mereka tidak sempat mendaftarkan diri mereka ke panitia penyelenggara pemilu sehingga mereka tidak bisa memilih di pemilu. Hal ini berkaitan dengan pembinaan dan pengarahan dari pemilih berpengalaman untuk pemilih pemula yang memang masih awam dengan pemilihan umum (Azirah, 2019:90).

4. Pemilihan Umum

Pada hakekatnya menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pelaksanaan penting dari demokrasi prosedural. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Soedarsono (2005) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945. (UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Asas pemilu menurut UU No.23 tahun 2003, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

a. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikansuaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.

d. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, perintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

5. Partai Politik

Partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan (terutama dibidang politik). Baik yang berdasarkan partai kader

atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka; maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) parpol juga berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideology politik tertentu (KBBI). Namun secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakankebijakan mereka. (Miriam Budiardjo, 2008)

Apabila membicarakan partai politik, demikian Lapalombara dan Weiner maka yang dimaksudkan bukan organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas dan kadang-kadang saja dengan para pendukungnya di daerah-daerah. Namun yang dimaksudkan dengan partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan artinya masa hidupnya tak tergantung pada masa jabatan atau masa hidupnya para pemimpin. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga ditingkat lokal. (Ramlan Surbakti, 1992)

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008). Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008) adalah sebagai berikut.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leader the control of a government, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages) (Miriam Budiardjo, 2008).

Kemudian Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo, 2008) mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut.

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view)

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Politik merupakan sebuah organisasi politik yang dibentuk berdasar kumpulan orang yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan (Eksekutif maupun Legislatif) dengan cara mencari dukungan rakyat yang akan memberikan suara melalui sebuah mekanisme pemilu yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang Undang.

Partai politik memiliki fungsi yang dilaksanakan, dimana hal ini menggambarkan peran partai politik yang sedang dilakukan, adapun peran dari partai politik adalah sebagai berikut: a). Komunikator Politik, b). negosiasi politik, c). Lobby Politik, d). Negotiator politik. Maka berdasarkan 4 fungsi dari pada partai politik diantaranya ada unsur komunikasi yang perlu dijalankan dalam mewadahi ke-4 fungsi tersebut, komunikasi politik sendiri dapat di artikan sebagai cara dalam menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (interest aggregation). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (interest articulation). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-

rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang 32 mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok (Miriam Budiardjo, 2008:406).

G. Definisi Konseptual

1. Strategi komunikasi politik adalah suatu teknik yang dipraktikkan untuk dapat mencapai suatu tujuan daripada partai politik, dimana praktek strategi komunikasi politik ini berfungsi untuk dapat mencakup banyak hal dan situasi yang cenderung fluktuatif, realita social tidak begitu monoton pada putaran pemilu, banyak aspirasi yang harus di dengar serta banyak tujuan yang harus di tempuh oleh suatu partai politik.
2. Pemilih pemula adalah mereka yang baru mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum, berlaku bagi pemilih baru yang berusia minimal 17 tahun.
3. Pemilihan umum adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
4. Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

H. Definisi Operasional

Setiap istilah konsep memiliki makna yang berbeda dalam konteks dan studi kasus yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk memperjelas konsep dari variabel yang diteliti sehingga tidak mendorong pemaknaan yang berbeda, maka dirumuskan definisi operasional atas variabel sebagai berikut:

1. Indikator Strategi Komunikasi Politik

a. Kredibilitas

Kredibilitas dalam komunikasi politik merujuk kepada tingkat kepercayaan dan keahlian komunikator dalam menyampaikan pesan. Kredibilitas berpengaruh kepada efektivitas pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik. Dalam studi kasus penelitian ini, peneliti berfokus kepada kredibilitas yang dimiliki PSI atau elit di dalam PSI melalui dua tolak ukur yaitu tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) dan keahliannya (*expertise*).

b. Daya Tarik

Daya tarik merupakan indikator yang merujuk kepada kemampuan menarik atensi audiens atau komunikasi melalui penampilan fisiknya, pola pikir, gaya berpakaian, wibawanya, atau kemampuan pidatonya. Dalam studi kasus skripsi ini, peneliti akan berfokus kepada *image* elit atau partai PSI itu sendiri dan pencitraan elit atau partai.

c. Kesamaan Sumber

Kesamaan sumber merujuk kepada kesesuaian antar harapan, kebutuhan, keinginan, dan perasaan audiens dengan komunikator politik. Dalam kasus ini, peneliti berfokus untuk mengkaji kesamaan perasaan, kebutuhan, dan harapan partai PSI dengan masyarakat Kota Yogyakarta.

d. Kekuatan (*power*)

Kekuatan diukur dari seberapa bisa dan kuat komunikator ini mempengaruhi audiens dengan pesan-pesannya. Dalam studi kasus skripsi ini, peneliti berfokus kepada bagaimana kemampuan elit atau partai politik PSI ini mempengaruhi masyarakat Kota Yogyakarta melalui pesan-pesan yang disampaikan.

Tabel 3. Definisi Operasional

Teori	Indikator	Keterangan
-------	-----------	------------

Strategi Komunikasi Politik	Kredibilitas	a. Kepercayaan Komunikator b. Keahlian Komuniaktor
	Daya Tarik	a. <i>Image</i> Elit/Partai b. Pencitraan Elit/Partai
	Kesamaan	a. Perasaan masyarakat b. Kebutuhan masyarakat c. Harapan masyarakat
	Kekuatan	a. Kemampuan persuasi b. Kemampuan kampanye

Sumber: Olahan Peneliti (2022)

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupaya menjabarkan penelitian yang sudah dilakukan dan hasil yang diperoleh dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dapat dijabarkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggabarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Data primer dari penelitian ini diantaranya adalah wawancara dengan Ketua DPW PSI Kota Yogyakarta selain itu juga dilakukan dengan pengurus DPW PSI Kota Yogyakarta, sehingga akan mendapat data yang akurat. Pada penelitian ini data primer bersumber dari pada hasil wawancara kepada kalangan pemuda-pemudi yang telah dapat hak pilih.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data penunjang dari sumber data primer yang mana data didapatkan berupa literature maupun dokumen atau naskah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dibutuhkan pada data sekunder, antarlain adalah data yang memiliki kaitan dengan dokumen-dokumen terkait perencanaan promosi yang dimiliki oleh tim sukses PSI, serta literature terkait hasil pemilihan yang dimiliki oleh PSI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan Teknik-teknik sebagai berikut.

a. Wawancara

Dalam tahap ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan narasumber atau informan terkait. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada ketua dan pengurus yang terkait di DPW PSI Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Tahap ini merupakan upaya dalam mendapatkan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen bisa berupa tulisan dan gambar. Dengan menggunakan teknik ini penulis bisa memperdalam dan melengkapi penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data menurut Sugiyono (2015) dalam menganalisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan pada proses penelitian berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dalam waktu tertentu. Terdapat langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan (Salim, 2006). Penulis dituntut melakukan analisis data yang harus masuk dalam penelitian dan mana yang tidak masuk dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dengan kata lain adalah menyambungkan data informasi agar mempermudah penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah-ubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.